



# Bayar Rp 5 Juta, SK Ngadat

Terbit di Jawa Pos Radar Bali,  
SK Diantar Sampai Rumah

**DENPASAR** - Kasus korupsi CPNS di Pemkab Tabanan, sebelumnya terungkap ada orang tuna rungu dan tuna wicara juga diperas. Sidang lanjutan kemarin (20/10) terungkap bahwa, ada saksi sudah menjelaskan bahwa anaknya sakit. Baru habis upacara tiga bulanan cucu. Sehingga dari Rp 60 juta yang diminta dia mampu menyerahkan Rp 5 juta. Uangnya diterima, namun SK-nya ngadat. Sampai kasus ini terkuak di koran *Jawa Pos Radar Bali*, akhirnya SK dibawakan pulang.

Sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar itu dipimpin oleh Hakim Ketut Gede Hariadi, Hakim Anggota Acmad Patensili dan Sumali. Dengan Tim Jaksa Fatur Rohman, Alfin, Lingga Nuarie, Ni Komang Sasmiti, Made Roy Joniarta dan lainnya. Sedangkan pengacara yang mendampingi Jagrem adalah Agus Gunawan Putra cs, sedangkan Candra dewi di dampingi pengacara Sukirman dan Jelantik.

Beberapa saksi yang dihadirkan kemarin, seperti Made Sudiartini, Made Mulyadi, Made Suciati, Ketut Mulyadi, Wayan Sukayun, Nyoman Mustika, Made Suliantika, Nyoman Ariawati, Wayan Sudiarka, Ketut Sunari dan Ni Ketut Winarni. Saksi pertama yang dihadirkan Jaksa adalah, Kasubdit bidang Formasi BKD Tabanan Winarni. Dia menjelaskan secara detail terkait mekanisme CPNS dan prosesnya. Namun ketika ditanya terkait dengan kasus ini



AGUNG BAYU/BALI EXPRESS

**DISKUSI:** I Gede Jagrem, terdakwa dugaan korupsi CPNS di Pemkab Tabanan saat berdiskusi bersama kuasa hukumnya dalam sidang di pengadilan tipikor Denpasar, kemarin. dia langsung mengatakan tiga tahu. "Saya tidak tahu, sampai sekarang," kilahnya aneh.

Kemudian terungkap juga, bahwa dia pernah mengantarkan lima orang ke ruang Sugiarta atasannya di BKD. "Saya antar sampai di pintu, tidak tahu ada kesepakatan membayar," kilahnya lagi.

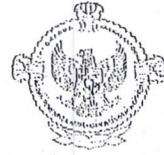
Ternyata lima orang itu, yang tidak membayar Rp 60 juta. Jaksa akhirnya membeberkan, bahwa lima orang itu sempat tidak mendapatkan SK. Namun

setelah kasus ini terbongkar di Radar Bali, akhirnya mendapatkan SK. "Benar memang belakangan mereka dapat SK," jelasnya. "Setelah terungkap di koran Radar Bali kan?," tanya Jaksa. "Iya," jawabnya. Akhirnya kliping Radar Bali ditunjukkan dihadapan hakim.

Yang menarik, adalah kesaksian dari pasutri Made Mulyadi dan Made Suciati. Suciati adalah honorer di DKP Tabanan, dan berhak menjadi PNS. "Saya menghadap ke Pak De Jagrem, dijelaskan perlu

Edisi : Rabu, 21 Okt 2015

Hal. : 25



dana Rp 60 juta untuk administrasi," jelasnya. Akhirnya Suciati keluar dan mencari suaminya, menjelaskan diminta uang Rp 60 juta. Mulyadi mengatakan dalam sidang, bahwa bertanya ke istrinya. "Nggak bisa nego?," ungkapnya bertanya keistinya saat itu.

Akhirnya Mulyadi yang masuk ke ruang Jagrem. Dia menjelaskan, bahwa kondisi keuangannya morat-marit. Anaknya sakit, kemudian habis ada upacara besar tiga bulanan cucu. Sehingga dia hanya punya dana Rp 5 juta. "Pak Jagrem (terdakwa) tidak menjawab, namun saya disuruh ke Ibu Candra Dewi (terdakwa)," ungkapnya. Candra Dewi menerima uang itu dan memberikan kuitansi. Namun teman-temannya Suciati sudah menerima SK, namun dia tetap tidak diberikan SK. Sampai akhirnya kasus ini meledak dikoran. "Setelah kasus meledak dikoran, datang ibu Sarinah kerumah saya malam-malam membawa SK. Sekitar satu bulan setelah teman-teman menerima SK," urainya.

Dia juga mengatakan sebelum kasus ini terbongkar sempat ada yang meminta tambahan bayaran. Namun dia tetap membayar Rp 5 juta. Dan saat ini Suciati sudah menjadi PNS penuh. Saksi selanjutnya juga cukup menarik, yakni korban Ketut Mulyadi yang dipanggil Jagrem untuk membayar Rp 60 juta. Kemudian dia pulang minta pertimbangan ke kakanya Mustika (bersaksi kemarin). Disepakati meminjam ke kakak iparnya Sukayun (saksi kemarin). Dapat meminjam uang Rp 60 juta, kemudian diserahkan ke candradewi dan mendapatkan kuitansi. (art/gup)

Edisi : Rabu, 21 Oct 2015

Hal. : 25



# Dermaga Curah Diduga Bodong

## Minta Pelindo Setor Dokumen

**GEROKGAK** - Pembangunan dermaga curah cair yang dibangun di sebelah timur Dermaga III Pelabuhan Celukan Bawang, ditengarai bodong alias belum mengantongi izin dari pemerintah. Proyek itu disebut telah disetujui oleh Pelindo III Cabang Celukan Bawang sebagai operator pelabuhan, sejak 10 Februari lalu. Namun proyek itu baru dimulai pada 28 Agustus lalu, dan sampai saat ini belum menunjukkan progress lanjutan.

Hal itu terungkap dalam sidak yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng, Selasa (20/10) kemarin. Dipimpin Kepala Badan Pol PP dan Linmas Buleleng Made Budi Astawa, aparat penegak perda ini tak mendapati aktifitas proyek. Hanya ada pipa-pipa besar dengan diameter sekitar 1,5 meter dan panjang 15 meter, yang teronggok di sebelah barat lokasi

“Meskipun di wilayah otorita, proyek ini ada di Kabupaten Buleleng. Suka tidak suka, mau tidak mau, proyek ini harus diketahui pemerintah. Ada etikanya. Ada proyek pemerintah *kok* tidak tahu.”

**Made Budi Astawa**  
Kabanpol PP dan Linmas Buleleng

pembangunan.

Informasi yang dihimpun, proyek itu sudah mulai disosialisasikan, setidaknya sejak tiga tahun lalu. Dermaga rencananya akan menjorok sejauh 300 meter ke tengah laut, dengan lebar hanya dua meter. Lebar dua meter itu rencananya digunakan menempatkan pipa-pipa baja, dan menyalurkan bahan-bahan curah cair, salah satunya aspal.

Kepala Polisi Pamong Praja Buleleng, Budi Astawa mengatakan, pihaknya sudah tiga kali mendatangi proyek itu, namun tak juga menemui otoritas pengelola proyek. Budi menengarai proyek itu tak mengantongi izin. Di antaranya STU/HO. Meski berada di wilayah otorita pelabuhan,

dia menganggap proyek itu tetap harus mengantongi izin.

“Suka tidak suka, mau tidak mau, proyek ini harus diketahui pemerintah. Ada etikanya. Ada proyek, pemerintah *kok* tidak

tahu,” kata Budi.

Saat mendatangi kantor pelindo, juga Polisi Pamong Praja tak mendapat jawaban yang memuaskan. Pihak pelindo hanya menunjukkan dokumen yang ada dari Kementerian Perhubungan. Sementara dokumen-dokumen dari pemerintah daerah, belum dapat ditunjukkan.

Pol PP pun meminta agar pihak pelindo dan otoritas pelabuhan mendatangi Kantor Bupati Buleleng, dan segera menyampaikan

dokumen perizinan. “Kalau tidak ada itikad baik, ya kita lihat saja nanti,” ujarnya. Perbekel Celukan Bawang Muhammad Anshari mengatakan, pihaknya selama ini tak tahu banyak mengenai proyek dermaga itu, karena masuk dalam kawasan otorita pelabuhan. Namun ia mengetahui jika proyek itu sempat dua kali melalui proses sosialisasi. “Saat sosialisasi itu ada banyak pejabat dari daerah. Saya kira sudah ada izinnnya,” katanya. (eps/yor)



FOTO-FOTO: AGUNG BAYU/BALI EXPRESS

**TUNGGU VONIS** : Alit Widhiadnyana AS Direktur PT Alit Wirajaya (kanan) dan Ngurah Kosala Cakrawerthi Direktur CV Unika Design (foto kanan) di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

## Korupsi Paving Gajah Mada Dituntut 1,5 Tahun

**DENPASAR** - Dua terdakwa kasus korupsi paving jalan Gajah Mada, Denpasar, yakni Alit Widhiadnyana AS sebagai Direktur PT Alit Wirajaya dan Ngurah Kosala Cakrawerthi Direktur CV Unika Design sebagai konsultan pengawas, kemarin mendengarkan Tuntutan Jaksa di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dua terdakwa ini dituntut masing-masing 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Ahmad Peten Sili, beserta Hakim Anggota Beslin Sihombing dan Nurbaya, itu tuntutan dibacakan jaksa Erawati Susina dan Putu Agus Adnyana Putra. Jaksa memastikan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disem-

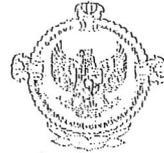
purnakan dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KHUP.

"Memohon kepada majelis agar terdakwa dihukum 1 tahun 6 bulan," tegas Jaksa. Selain itu juga menuntut terdakwa, agar didenda Rp 50 juta subsider 3 bulan. Artinya jika tidak mampu membayar denda, hukuman ditambah 3 bulan. Sedangkan untuk terdakwa, Alit Widhiadnyana AS membayar uang pengganti sebesar 210 juta lebih, jika tidak mampu membayar hukumannya ditambah 9 bulan.

Usai sidang dijelaskan bahwa terdakwa Alit sudah mengembalikan kerugian Negara atau sudah menitipkan ke Jaksa. Namun tetap Jaksa membacakan dalam tuntutan. **(art/han)**

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal. : 24

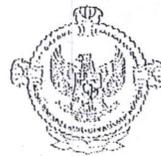


## PEMKOT Rp 2,6 M untuk Pengamanan Pilkada dari Perubahan

UNTUK mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Denpasar 9 Desember 2015 mendatang, Pemerintah Kota Denpasar menggelontor anggaran sebesar Rp 2.691.640.000 untuk dana pengamanan. Dana tersebut pun telah ditransfer ke Polresta Denpasar dalam bentuk Hibah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali yang berasal dari APBD Perubahan, Senin kemarin (20/10). Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kota Denpasar Ida Bagus Rahoela mengungkapkan, pencairan dana tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, DPRD Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar dan Kepolisian Resort Kota Denpasar beberapa waktu lalu. (hen/han)

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal. : 24



# Perizinan SLK Disebut Sudah Lengkap

## Sudah Ada Izin SPK dari Kementerian Pendidikan

**DENPASAR** - Persoalan yang membelit Sekolah Lentera Kasih (SLK) yang diduga dikelola di bawah Perusahaan Terbatas, akhirnya di jawab oleh penasihat hukum SLK, Selasa (20/10) kemarin.

Penasihat Hukum SLK Rifan menyebutkan, tidak ada masalah di dalam SLK sendiri, pasalnya semua berkas, termasuk berkas perizinan sudah dilengkapi semuanya, termasuk juga izin Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia No. 1/MPK/C/ KL/2015. "Jadi sebenarnya tidak ada masalah di kami. Kami siap memberikan bukti lain lagi jika memang kami dikatakan bermasalah," terangnya saat menyampaikan Hak Jawab kepada Jawa Pos Radar Bali.

Rifan pun menjelaskan, bahwa SLK sendiri memang awalnya dikelola oleh Badan Hukum Pendidikan (BHP) dalam bentuk PT, dan itu sesuai dengan UU 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. "Tetapi, berhubung Mahkamah Konstitusi membatalkan UU 9/2009 tersebut pada April 2010, maka mau tidak mau kami merubah SLK menjadi sebuah yayasan. Bahkan, semua proses itu sudah kami lakukan, baik ke pusat, maupun di daerah," ujarnya.

Selain itu Rifan juga membeberkan bahwa, SLK sendiri telah beralih status

menjadi lembaga yayasan yang tertuang dalam Akte No. 04 tertanggal 16 Januari 2011, serta sudah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-8863-AH.01.04 tahun 2011 tertanggal 27 Desember 2011. "Jadi kami ingin klarifikasi bahwa, semua dokumen SLK kami pegang. Sekali lagi, kami pastikan SLK tidak ada masalah," terangnya.

Selain itu, Rifan juga mengungkapkan masalah akreditasi SD SLK yang sempat belakangan dipermasalahkan. Ia menegaskan, untuk persoalan akreditasi SLK sudah diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan PTUN sudah menolak pengajuan yang mempersoalkan akreditasi SLK tersebut melalui putusan No 116K/TUN/2014 tertanggal 12 Juni 2014. "Kami tegaskan kembali bahwa Yayasan Sekolah Lentera Kasih Permata Hati sudah sah secara hukum dan diakui kedudukannya," ujarnya.

Sementara itu, Rifan juga membeberkan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh orang tua wali siswa SLK yang bernama IW, yang meminta ganti kerugian Rp 3 miliar sampai dengan Rp 5 miliar tanpa dasar yang jelas kepada SLK. "Kami sudah laporkan kepada Polda Bali pada tanggal 13 Oktober 2015. Karena dalam suratnya tertanggal 12 Mei 2014 dia meminta ganti rugi tanpa alasan yang jelas," pungkasnya. (hen/gup)

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal. : 24



## PNS BADUNG

### Alasan Kinerja, Digelontor Rp 408 M

MANGUPURA – Sebagai kabupaten terkaya di Bali, dengan APBD hampir Rp 4 triliun, apa pun bisa dilakukan Pemkab Badung. Termasuk memanjakan para pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat tinggi. Tahun 2016 mendatang, PNS di Badung dirancang mendapat tunjangan besar. Pemkab Badung merancang tunjangan untuk seluruh PNS sebesar Rp 408 miliar.

Menariknya, angka fantastis itu diberikan diluar gaji pokok. Jadi, PNS akan tetap menerima gaji pokok plus mendapat tunjangan melimpah. Tambahan tunjangan Rp 408 miliar ini melonjak cukup besar dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 311 miliar.

Itu belum seberapa. Pasalnya, jika ditambahkan dengan jumlah gaji PNS, maka pengeluaran APBD untuk pegawai tahun 2016 sebesar Rp 1,3 triliun. "Besarnya tunjangan ini sangat membantu kesejahteraan pegawai. Imbasnya terhadap peningkatan kinerja pegawai," ujar Sekda Badung Kompyang R Swandika dalam rapat di gedung dewan kemarin (20/10). Besarnya tunjangan ini diklaim dapat meningkatkan kinerja PNS di Badung

► Baca Alasan... Hal 31

## Alasannya untuk Tingkatkan Kinerja

### ■ ALASAN...

Sambungan dari hal 21

Kompyang menyebut Pemkab Badung sudah melakukan kajian dan analisis peningkatan kinerja PNS. Katanya, dengan adanya peningkatan tunjangan, akan berdampak pada semangat kerja pegawai. Sehingga pelayanan kepada masyarakat juga bisa ditingkatkannya. "Jadi, analisis sudah ada. Analisis kinerja dan analisis jabatan sudah ada semua," imbuh Kompyang.

Tapi, peningkatan tunjangan kesejahteraan dewan ini mendapat kritik keras dari Komisi III DPRD Badung. Komisi yang mengawasi masalah keuangan itu menilai pemerintah terlalu memanjakan pegawai. "Kami minta rincian penggunaan tunjangan Rp 408 miliar itu. Kami

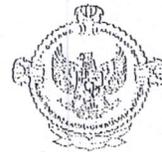
ingin tahu penggunaan per SKPD," tegas Nyoman Satria, Ketua Komisi III.

Satria membandingkan dengan pendapatan yang diterima anggota dewan. Bahkan, ujar Satria, untuk pencairan dana hibah dewan saja dipersulit. "Dewan ini terlalu polos seperti air. Sedangkan eksekutif luar biasa. Anggaran Rp 1,3 triliun untuk belanja pegawai itu *liyu* (banyak, Red)," sentil Satria.

Politisi asal Mengwi ini juga protes karena perhatian pemkab hanya berat sebelah. Pemkab sangat serius memperhatikan nasib PNS. Sedangkan tenaga kontrak atau non-PNS nasibnya masih memprihatinkan. Tunjangan yang dianggarkan ratusan miliar itu tidak diperuntukkan pegawai kontrak. Peningkatan kesejahteraan ini akan menjadi tidak berarti jika tanpa diimbangi kerja PNS. (san/pit)

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal. : 21 dan 31



## SEWA RUKO

### Inspektorat Diterjunkan ke Gilimanuk

NEGARA - Penyewaan ruko di Terminal Manuver Gilimanuk untuk tempat kos, membuat gerah Pemkab Jembrana sebagai pemilik aset. Untuk mengecek kebenaran adanya ruko yang menjadi tempat kos dan menelusuri aliran dana dari hasil sewa ruko itu, Pemkab menurunkan Inspektorat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan setelah mendapat informasi penyewaan ruko tersebut, Asisten I Pemkab Jembrana I Made Sudiada langsung memanggil Lurah Gilimanuk I Gede Ngurah Widiada. Lurah dipanggil untuk dimintai penjelasan terkait aset Pemkab yang pemanfaatannya semestinya untuk berjualan menjadi rumah kos itu.

"Kami sudah panggil lurah Gilimanuk. "Kami akan menurunkan Inspektorat untuk memeriksa dan menelusuri kebenaran pengelolaan ruko itu," ujar Sekkab Jembrana I Gede Gunadnya, Selasa (20/10) kemarin.

Kata dia, Inspektorat akan turun ke Gilimanuk untuk mengungkap kemana uang dari hasil kontrak ruko itu. Sekadar informasi, jika dihitung dari 30 ruko milik Pemkab yang ada dan yang dikontrak sebanyak 7 ruko dengan nilai Rp 5.000 per hari atau Rp 150 ribu perbulan per ruko, maka pemasukan yang didapat Rp1.050.000 dalam sebulan. Apalagi uang hasil kontrakan ruko yang merupakan aset Pemkab dan semestinya masuk ke kas daerah tidak pernah disetorkan, namun disebut untuk biaya keberanian. (nom/yor)

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal. : \_\_\_\_\_



SANDIJAYA MAULANA/RADAR BALI

TETAP ALOT : Suasana rapat antara Banggar DPRD Badung dengan eksekutif tetap tak bisa cairkan dana hibah.

## Talangi Hibah, Ngebon Ratusan Juta

### Eksekutif Tetap Tak Mau Cairkan

**MANGUPURA** - Pencairan dana hibah dewan di Badung terus saja memanas. Rapat kerja (raker) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemarin (20/10) berlangsung sengit. Kalangan dewan menyerang habis-habisan eksekutif yang dipimpin langsung Penjabat (Pj) Bupati Badung

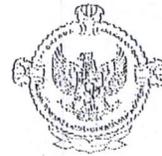
Nyoman Harry Yudha Sakka dan Sekda Kompyang R Swandika. Eksekutif pun terpojok dan mati kutu menghadapi api kemarahan dewan.

Kalangan dewan blak-blakan mengalami kerugian besar akibat macetnya dana hibah. Dewan mengaku harus merogoh kantong pribadi hingga ratusan juta. Anggota Fraksi Golkar, Wayan Suyasa dengan nada tinggi dan keras "menyerang" eksekutif ■

► Baca *Talangi...* Hal 31

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal. : 21



Sambungan ---

# Buru-buru Tutup Rapat

## ■ TALANGI...

Sambungan dari hal 21

Suyasa mengaku telah mengeluarkan uang Rp 400 juta. Bahkan, ada anggota dewan yang mengeluarkan uang hingga Rp 800 juta. Yang menarik, di sela-sela rapat terdengar jika uang yang dikeluarkan dewan hingga ratusan juta adalah uang pinjaman di bank hingga koperasi.

Suyasa mengatakan, uang itu dikeluarkan untuk menepati janji kepada masyarakat. Politisi asal Penarungan, Mengwi itu mengaku malu jika tidak bisa menepati janji. "Saya tidak mengharapkan ganti rugi apapun. Saya sudah keluar uang Rp 400 juta untuk menepati janji proposal hibah yang sudah diajukan. Pak pejabat yang saya hormati, hibah ini untuk rakyat, sepeser pun tidak ada kami makan," sodok Suyasa.

Masih dengan nada berapi-api, Suyasa menyoal kebijakan Pj bupati yang terkesan takut mencairkan dana hibah. Sementara di daerah lain di Buleleng dana hibah bisa dicairkan. Sodokan tak kalah keras dilontarkan anggota Fraksi PDIP, Made Sumerta. Menurut Sumerta, wajar jika dewan marah dan kecewa.

Lain lagi dengan politisi senior PDIP, Wayan Sandra. Pria asal Tibubeneng, Kuta Utara itu menyebut dirinya sudah mulai bosan melihat masalah hibah yang tak

berujung. Selain hibah, dewan kembali mempermasalahkan munculnya angka Rp 37 miliar di RAPBD Badung 2016. Angka itu disebut angka siluman karena tanpa sepengetahuan dewan. "Mohon dijelaskan angka Rp 37 miliar itu dari mana dan untuk apa saja," pinta Sunarta.

Sekda Kompyang R Swandika menjelaskan, angka Rp 37 miliar didapat dari sisa Silpa tahun anggaran sebelumnya. Dana itu digunakan untuk belanja yang dinilai penting. "Jadi, walau sudah diteken KUA/PPAS, bukan berarti dikunci untuk revisi. Kami belanja untuk hal yang penting dan mendesak," jelas Kompyang.

Dijelaskan lebih jauh, salah satu belanja

yang besar adalah pembelian mobil pemadam kebakaran (Damkar) senilai Rp 14 miliar. Selain Damkar, dana Rp 37 miliar juga digunakan untuk membuat kelas baru di beberapa sekolah. "Selama ini armada damkar di Badung sudah banyak, tapi tidak ada yang bertangga. Jadi, kalau ada kebakaran gedung berlantai kami tak berdaya," ujar pejabat asal Kerobokan itu.

Mendapat gelombang pertanyaan dan kritik, Yudha Saka yang duduk di meja pimpinan rapat tampak sedikit gelagapan. Yudha Saka menjawab pertanyaan dewan dengan jawaban normatif. Pria asal Buleleng ini menjawab pertanyaan terkait hibah dengan kalimat singkat dan

pendek. "Bukan masalah takut atau berani, tapi ini sudah ada surat edaran dari Mendagri. Jelas dalam surat tersebut, penerima hibah harus berbadan hukum nasional," jelas Yudha.

Mendapat jawaban seperti itu, Ketua Komisi III Nyoman Satria naik pitam. Politisi PDIP ini langsung menyodorkan pertanyaan menohok pada Yudha Saka. "Kalau memang hibah tidak boleh, kenapa pada RAPBD 2016 muncul anggaran Rp 111 miliar untuk hibah. Apa aturannya itu? Kenapa itu bisa terpasang?" sodok Satria.

Yudha Saka tetap santai memberikan jawaban. "Saya tidak mengatakan hibah tidak boleh, tapi diterima bagi yang memiliki badan hukum. Jadi, itu saja penjelasan saya, saya akhiri," jawab Yudha langsung mengakhiri pembicaraan. Meski Yudha sudah mengakhiri rapat dan mengucapkan *prama shanti*, dewan tetap ngotot. Bahkan semakin bersemangat memberi protes. Koran ini menghitung setidaknya tiga kali rapat ditutup tapi masih mendapat sanggahan.

Melihat situasi mulai tak terkendali. Akhirnya Sunarta yang memimpin rapat meminta penjelasan tertulis SKPD. Penjelasan itu berkaitan dengan hibah mana saja yang boleh dan tidak bisa dicairkan. Selanjutnya disetorkan ke dewan. Sunarta pun dengan buru-buru menutup rapat. (san/pit)